

**DAMPAK PERUBAHAN PENGGUNAAN LAHAN PERTANIAN MENJADI NON-
PERTANIAN TERHADAP KEPADATAN PENDUDUK DAN AKSESIBILITAS DI
KABUPATEN SLEMAN**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Terapan Pada Program
Studi Diploma IV Pertanahan



Oleh :

MUH. RIF'AN

NIT. 21303840

**KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/
BADAN PERTANAHAN NASIONAL
POLITEKNIK AGRARIA STPN**

2026

ABSTRACT

The conversion of agricultural land into non-agricultural use is an increasingly common phenomenon in peri-urban areas, including Kapanewon Gamping, Mlati, and Depok in Sleman Regency, driven by population growth, urbanization, and rising infrastructure demands. This study aims to analyze the influence of population density and accessibility on land use change in these three sub-districts during the 2019–2024 period, and to identify the impacts and solutions arising from such change. A mixed-methods approach was employed, combining spatial analysis through the overlay of 2019 and 2024 satellite imagery to map land use change, correlation and multiple linear regression tests processed using SPSS, and in-depth interviews with affected residents and village officials as qualitative data. The results indicate that accessibility has a strong and significant relationship with land use change, while population density also shows a significant effect within the regression model despite a relatively weak correlation. The conversion of agricultural to non-agricultural land has resulted in shifting livelihoods, reduced agricultural land area, and increased accessibility and mobility burdens for the community. This study recommends strengthening spatial planning policies, controlling the conversion of productive agricultural land, and improving sustainable accessibility so that regional development does not compromise environmental sustainability.

Keywords: *land use change, population density, accessibility, agricultural land, Sleman Regency*

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN	ii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iii
MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRACT	viii
INTISARI	ix
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan dan Manfaat	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORITIS	7
A. Kajian Terdahulu	7
B. Kajian Teori	12
C. Kerangka Pemikiran	17
D. Hipotesis	18
BAB III METODE PENELITIAN	19
A. Jenis Penelitian	19
B. Lokasi Penelitian	20
C. Populasi dan Sampel	21
D. Teknik Pengumpulan Data	23
E. Analisis Data	23
BAB IV GAMBARAN UMUM WILAYAH PENELITIAN	25
A. Letak geografis wilayah penelitian	25
B. Kondisi topografi	28
C. Kepadatan penduduk	29
D. Aksesibilitas	30

BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN.....	32
A. Faktor Kepadatan Penduduk dan Aksesibilitas.....	32
B. Dampak dan Solusi	53
BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN	57
A. Kesimpulan.....	57
B. Saran.....	58
DAFTAR PUSTAKA.....	59
LAMPIRAN	62

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Lahan dapat berubah dari waktu ke waktu sesuai dengan pemanfaatannya (Savitri dan Supriatna, 2021). Saat ini lahan sangat penting untuk keberlangsungan hidup setiap manusia. Lahan dianggap sebagai salah satu faktor yang dapat memengaruhi penyebaran penggunaan lahan Menurut Barlowe dalam (Savitri dan Supriatna, 2021). Menurut Barlowe, berdasarkan pernyataan tersebut dapat disimpulkan lahan memiliki peran penting bagi keberlangsungan hidup manusia dan mengalami perubahan seiring waktu tergantung pada pemanfaatannya. Selain itu, lahan juga menjadi faktor utama yang memengaruhi pola penggunaan lahan di berbagai wilayah.

Salah satu masalah umum yang dihadapi oleh kota-kota besar di Indonesia adalah peningkatan jumlah penduduk di perkotaan. Hal ini disebabkan oleh faktor urbanisasi dan pertumbuhan penduduk alamiah. Kedua faktor ini pada akhirnya menyebabkan berbagai masalah di perkotaan, seperti kurangnya ruang untuk kebutuhan perumahan (Prihatin, 2016).

Perubahan penggunaan lahan pertanian menjadi non-pertanian merupakan fenomena yang semakin marak terjadi di daerah perkotaan dan peri-urban, termasuk di Kapanewon Depok, Kabupaten Sleman. Seiring dengan terjadinya laju kepadatan penduduk dengan pertumbuhan ekonomi, urbanisasi, dan peningkatan kebutuhan akan infrastruktur serta perumahan, lahan pertanian mengalami konversi yang signifikan. Fenomena ini tidak hanya mempengaruhi struktur fisik wilayah, tetapi juga berdampak pada kepadatan penduduk dan aksesibilitas masyarakat terhadap berbagai layanan publik. Karena pertumbuhan penduduk yang pesat di Indonesia, ada peningkatan kebutuhan akan lahan, ini seringkali menyebabkan konflik kepentingan tentang penggunaan lahan dan ketidaksesuaian antara penggunaan lahan dan rencana peruntukannya (Eko dan Rahayu, 2015). Karena lahan semakin terbatas di

perkotaan, orang mulai mencari cara lain untuk mendirikan permukiman atau memenuhi kebutuhan mereka akan lahan, yang semuanya berada di lokasi strategis di pinggiran kota, menciptakan wilayah peri-urban (Khadiyanto dalam Suprayogi dan Rochani, 2021).

Kapanewon Gamping, Mlati, dan Depok terletak di wilayah strategis yang dekat dengan kota jogja, menjadikannya sebagai salah satu daerah tujuan bagi masyarakat yang mencari tempat tinggal dalam beberapa tahun terakhir, Kapanewon Gamping, Mlati, dan Depok mengalami peningkatan jumlah penduduk yang cukup pesat. Konversi lahan pertanian menjadi permukiman, pusat perbelanjaan, dan fasilitas umum lainnya berkontribusi terhadap peningkatan arus migrasi masuk, yang pada akhirnya memengaruhi tingkat kepadatan penduduk. Peningkatan kepadatan ini dapat berdampak pada kualitas hidup masyarakat, baik dari segi ketersediaan lahan untuk tempat tinggal maupun kelayakan lingkungan. Kepadatan penduduk yang tinggi dapat menyebabkan berbagai masalah, seperti kemacetan, penurunan kualitas lingkungan, dan meningkatnya kebutuhan akan infrastruktur. Semakin banyak lahan yang dibutuhkan di kota, lebih sedikit lahan yang tersedia. Akibatnya konflik antara berbagai kepentingan dalam penggunaan lahan menyebabkan salah satu atau lebih kepentingan dikalahkan atau penggunaan lahan yang direncanakan menempati ruang dengan proporsi yang tidak sesuai (wahyudi, 2009).

Aksesibilitas pada dasarnya merupakan ukuran kemudahan dalam melakukan perjalanan guna memenuhi berbagai kebutuhan, yang terbentuk dari interaksi antara pola tata guna lahan dan sistem jaringan transportasi. Aksesibilitas adalah ukuran kemudahan dalam melakukan perjalanan dari lokasi tempat tinggal ke lokasi pelayanan yang dibutuhkan ukuran kemudahan dinyatakan dalam indeks aksesibilitas (La Ode Muhamad Magribi; Aj Suhardjo, 2020). Wahyunto dkk, perubahan penggunaan lahan adalah ketika lahan digunakan untuk berbagai tujuan, kemudian digunakan untuk tujuan lain, atau ketika jenis penggunaan lahan berubah seiring waktu. namun, seperti yang dinyatakan marangkup penggunaan lahan terdiri dari jalan, lahan publik,

industri, perdagangan, dan jasa, serta lahan permukiman dan kosong (arifia dkk., 2017).

Jumlah penduduk yang meningkat di Indonesia menyebabkan peningkatan kebutuhan akan lahan. Konflik kepentingan dan ketidaksesuaian antara penggunaan lahan dan rencana peruntukannya sering kali terjadi karena hal ini keterbatasan lahan di perkotaan mendorong masyarakat untuk mencari lahan pinggiran kota yang lebih strategis. Secara keseluruhan, pembangunan kawasan perkotaan berdampak negatif pada lingkungan sekitar, seperti mengurangi kemampuan untuk menyediakan tempat tinggal yang nyaman dan sehat bagi penduduk perkotaan (Anisyaturrobiah, 2021).

Dalam Keputusan Presiden No 34 Tahun 2003 tentang Kebijakan Nasional di Bidang Pertanahan disebutkan bahwa pemerintah/kota memiliki kewenangan di bidang pertanahan, antara lain perencanaan penggunaan lahan wilayah/kota. Dalam pengertian ini pun dimungkinkan adanya perubahan penggunaan lahan pasal 2 ayat (2) Keppres No 34 Tahun 2003. Dalam listyawati (2012) untuk memastikan penggunaan lahan yang berkelanjutan dan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan, peraturan yang berlaku terus mengatur penggunaan lahan.

Perda Kabupaten Sleman nomor 3 tahun 2015 tentang izin pemanfaatan ruang mengatur ketentuan perizinan, pembinaan dan pengendalian, penyidikan, serta sanksi terkait pemanfaatan ruang di Kabupaten Sleman. sebagai tindak lanjut, peraturan Bupati Kabupaten Sleman nomor 21 tahun 2017 memberikan petunjuk pelaksanaan atas peraturan tersebut. Peraturan ini menetapkan bahwa setiap orang yang memanfaatkan ruang untuk kegiatan pembangunan fisik atau kegiatan yang mengakibatkan perubahan fungsi lahan sebelumnya wajib memiliki izin pemanfaatan ruang.

Peraturan ini sangat penting untuk diterapkan di Kapanewon Gamping, Mlati, dan Depok Kabupaten Sleman, karena wilayah ini mengalami perkembangan pesat karena pertumbuhan sektor pendidikan dan ekonomi. Dengan meningkatnya pembangunan permukiman, kawasan komersial, dan fasilitas umum, pengelolaan izin penggunaan lahan harus dilakukan dengan

hati-hati agar efek negatif seperti kemacetan, penurunan ruang hijau, atau penurunan kualitas lingkungan tidak terjadi. Akibatnya, untuk menjaga keseimbangan antara pembangunan dan kelestarian lingkungan di Kapanewon Gamping, Mlati, dan Depok, kepatuhan terhadap peraturan ini sangat penting. Perubahan fungsi lahan dari pertanian menjadi non-pertanian di kecamatan Godean dan Mlati cenderung terakumulasi (terkelompok) di area-area yang memiliki infrastruktur yang baik dan dekat dengan pusat pertumbuhan dalam periode 8 tahun, lahan yang mengalami perubahan fungsi menunjukkan pola penyebaran yang mengikuti jaringan jalan (Grafika & Kampus, 2024).

Berdasarkan pernyataan di atas peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul "Dampak Perubahan Penggunaan Lahan Pertanian Menjadi Non-Pertanian Terhadap Kepadatan Penduduk Dan Aksesibilitas di Kapanewon Gamping, Mlati, Dan Depok Kabupaten Sleman". Dipilihnya lokasi penelitian tersebut karena Kapanewon Gamping, Mlati, Depok merupakan wilayah yang berbatasan langsung dengan kota jogja dan mengalami pertumbuhan pesat akibat kepadatan penduduk, yang berimplikasi pada perubahan penggunaan lahan. Meningkatnya jumlah kepadatan penduduk, aksesibilitas dan kebutuhan akan ruang, sehingga dapat memberikan rekomendasi untuk pengelolaan penggunaan lahan yang berkelanjutan dan sesuai dengan rencana tata ruang yang berlaku.

B. Rumusan Masalah

Perubahan penggunaan lahan dari pertanian ke non-pertanian di Kapanewon Gamping, Mlati, dan Depok, Kabupaten Sleman, pada periode 2019 dan 2024 menjadi isu penting yang berkaitan dengan perkembangan wilayah dan pertumbuhan ekonomi. Perubahan ini dapat berdampak pada meningkatnya kepadatan penduduk serta aksesibilitas masyarakat terhadap berbagai layanan publik. Berdasarkan latar belakang tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah faktor kepadatan penduduk dan aksesibilitas berpengaruh terhadap perubahan penggunaan lahan di Kapanewon Gamping, Mlati, dan Depok Kabupaten Sleman antara tahun 2019 dan 2024?
2. Apa saja dampak dan solusi dari perubahan penggunaan lahan pertanian menjadi non pertanian terhadap kepadatan penduduk dan aksesibilitas di Kapanewon Gamping, Mlati, dan Depok Kabupaten Sleman?

C. Tujuan dan Manfaat

1. Tujuan penelitian
 - a. Menganalisis pengaruh kepadatan penduduk dan aksesibilitas terhadap perubahan penggunaan lahan di Kapanewon Gamping, Mlati, dan Depok Kabupaten Sleman pada periode tahun 2019 dan 2024.
 - b. Mengidentifikasi dampak dan solusi akibat dari perubahan penggunaan lahan pertanian menjadi non pertanian terhadap kepadatan penduduk dan aksesibilitas di Kapanewon Gamping, Mlati, dan Depok Kabupaten Sleman.

2. Manfaat Penelitian

- a. Manfaat Akademis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan di bidang perlahanan, perencanaan tata ruang, dan geografi. Hasil penelitian dapat menjadi referensi bagi akademisi dan peneliti lain yang tertarik pada isu-isu perubahan penggunaan lahan dan dampaknya.

- b. Manfaat sosial

1. Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pengelolaan penggunaan lahan yang berkelanjutan. Dengan informasi yang jelas dan akurat, masyarakat dapat lebih memahami dampak dari konversi lahan terhadap kualitas hidup mereka.
 2. Hasil penelitian dapat mendorong partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan dan pengambilan keputusan terkait penggunaan lahan.

Dengan melibatkan masyarakat, diharapkan keputusan yang diambil akan lebih sesuai dengan kebutuhan dan harapan mereka.

3. Dengan memberikan rekomendasi yang relevan untuk meningkatkan aksesibilitas dan kualitas infrastruktur, penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kapanewon Gamping, Mlati, dan Depok Kabupaten Sleman. Aksesibilitas yang lebih baik terhadap layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan transportasi akan mendukung kualitas hidup yang lebih baik bagi masyarakat.

c. Manfaat Praktis

1. Penelitian ini dapat memberikan data dan analisis yang berguna bagi pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan perencanaan tata ruang yang lebih efektif dan berkelanjutan. Dengan pemahaman yang lebih baik tentang perubahan penggunaan lahan, perencanaan dapat dilakukan dengan mempertimbangkan kebutuhan masyarakat dan kelestarian lingkungan.
2. Hasil penelitian dapat memberikan rekomendasi konkret bagi pengambil kebijakan dalam mengelola perubahan penggunaan lahan, termasuk pengembangan infrastruktur dan penyediaan layanan publik yang lebih baik.
3. Dengan menganalisis dampak perubahan penggunaan lahan terhadap aksesibilitas, penelitian ini dapat memberikan masukan untuk perbaikan infrastruktur transportasi dan layanan publik, sehingga meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh kepadatan penduduk dan aksesibilitas terhadap perubahan penggunaan lahan di Kapanewon Gamping, Mlati, dan Depok, Kabupaten Sleman, dalam periode 2019 dan 2024. Berdasarkan hasil analisis data spasial dan wawancara, diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Kepadatan penduduk dan aksesibilitas berpengaruh signifikan terhadap perubahan penggunaan lahan pertanian menjadi non-pertanian. Hasil uji regresi dan korelasi membuktikan secara konsisten bahwa peningkatan jumlah penduduk mendorong kebutuhan permukiman, sementara kemudahan aksesibilitas melalui jaringan jalan dan fasilitas publik mempercepat laju konversi lahan pertanian.
2. Perubahan penggunaan lahan pertanian menjadi non-pertanian secara nyata mengubah mata pencaharian penduduk, mengurangi lahan pertanian, serta meningkatkan beban aksesibilitas dan mobilitas masyarakat.
3. Dampak tersebut harus segera diatasi melalui penguatan kebijakan tata ruang, pengendalian tegas terhadap alih fungsi lahan pertanian produktif, dan peningkatan kualitas aksesibilitas yang berkelanjutan, agar pembangunan wilayah tidak mengorbankan keberlanjutan lingkungan.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah dirumuskan, penelitian ini mengajukan beberapa saran yang relevan bagi pemangku kepentingan terkait, serta rekomendasi untuk penelitian selanjutnya:

1. Bagi Pemerintah Daerah

Pemerintah Kabupaten Sleman perlu memperkuat pengendalian alih fungsi lahan pertanian melalui implementasi kebijakan tata ruang yang tegas, memberikan insentif bagi petani agar mempertahankan lahan produktif, serta mengawasi pembangunan permukiman agar tetap sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).

2. Bagi Masyarakat

Masyarakat di wilayah Kapanewon Gamping, Mlati, dan Depok diharapkan lebih bijak dalam memanfaatkan lahan pertanian, dengan tetap mempertimbangkan keberlanjutan lingkungan dan ketahanan pangan lokal. Partisipasi aktif masyarakat dalam menjaga lahan pertanian produktif akan membantu mengurangi dampak negatif urbanisasi.

3. Bagi Pengembang dan Sektor Swasta

Pengembang properti dan sektor swasta diharapkan memprioritaskan pembangunan pada lahan yang sudah dialokasikan sebagai kawasan non-pertanian, serta mengintegrasikan pembangunan dengan aksesibilitas transportasi yang ramah lingkungan.

4. Bagi Penelitian Selanjutnya

Penelitian mendatang disarankan untuk memperluas variabel, misalnya faktor sosial-ekonomi, kualitas lingkungan, atau dampak ekonomi konversi lahan, sehingga dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai dinamika perubahan penggunaan lahan.

DAFTAR PUSTAKA

- Adiwibowo, S., & Santoso, E. (2018). Dampak alih fungsi lahan terhadap kepadatan penduduk di wilayah pinggiran kota. *Jurnal Wilayah dan Lingkungan*, 6(1), 33–46.
- Alvina, C. A., & Triani, M. (2022). Analisis pengaruh infrastruktur jalan dan kepadatan penduduk terhadap pendapatan per kapita di Pulau Sumatera. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 20(2), 145–160
- Amri, K. (2014). Infrastruktur transportasi dan kepadatan penduduk dampaknya terhadap pendapatan per kapita. *Jurnal Ekonomi Manajemen dan Bisnis*, 2(2), 438–450.
- Anisyaturrobiah, A. (2021). Dampak urbanisasi terhadap penyediaan pemukiman. *Jurnal Ekonomi Bisnis dan Akuntansi*, 1(2), 43–54
- Arafat, R., Yunaf, A. S., & Marliantoni. (2021). Analisis perubahan penggunaan lahan dan kerapatan vegetasi di kawasan pertambangan Rantau Pandan Kabupaten Bungo Provinsi Jambi. *Mine Magazine (MineMagz)*, 2(1), 1–8
- Arifia, D., Soedwiwahjono, S., & Utomo, R. P. (2017). Pengaruh perkembangan kegiatan perdagangan dan jasa terhadap perubahan penggunaan lahan di kawasan Solo Baru. *Arsitektura*, 15(1), 1–10.
- Bappeda Sleman. (2022). Rencana tata ruang wilayah Kabupaten Sleman tahun 2022–2042. Sleman: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sleman.
- Desianingtyas, M. (2013). Dampak pertumbuhan penduduk terhadap alih fungsi lahan di Kabupaten Sukoharjo tahun 2000–2013. *Jurnal Geografi*, 11(2), 101–115.
- Eko, T., & Rahayu, S. (2015). Land use change and suitability for RDTR in peri-urban areas: Case study District Mlati. *Jurnal Pembangunan Wilayah dan Kota*, 8(4), 330–340.
- Fahyudi, D. I., Christiawan, P. I., & Sarmita, I. M. (2020). Perkembangan luas permukiman dan penggunaan lahan pada wilayah perkotaan. *Jurnal Pendidikan Geografi Undiksha*, 8(3), 140–147.
- Habibatussolikhah, A. T., Darsono, D., & Ani, S. W. (2020). Analisis faktor yang memengaruhi alih fungsi lahan sawah ke non sawah di Kabupaten Sleman. *SEPA: Jurnal Sosial Ekonomi Pertanian dan Agribisnis*, 16(1), 61–70.
- Handayani, R. (2020). Dampak perubahan penggunaan lahan terhadap aksesibilitas jalan di Sleman. *Jurnal Geografi*, 12(1), 55–66.
- Hendrayadi, Kustati, M., & Sepriyanti, N. (2023). Mixed methode research. *Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran (JRPP)*, 6(4), 2402–2410.
- Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional. (2021). Rencana tata ruang wilayah dan pengendalian pemanfaatan ruang. Jakarta: Direktorat Jenderal Tata Ruang.

- Kusumaningrum, R. (2019). Alih fungsi lahan pertanian dan perubahan struktur mata pencaharian di Kabupaten Sleman. *Jurnal Pembangunan Wilayah dan Perencanaan Partisipatif*, 14(2), 145–158.
- La Ode, M., & Suhardjo, A. (2020). Aksesibilitas dan pengaruhnya terhadap pembangunan di perdesaan: Konsep model sustainable accessibility pada kawasan perdesaan di Provinsi Sulawesi Tenggara. *Jurnal Transportasi*, 4(2), 149–160.
- Listyawati, H. (2012). Kegagalan pengendalian alih fungsi tanah dalam perspektif penatagunaan tanah di Indonesia. *Mimbar Hukum*, 22(1), 37–52.
- Litman, T. (2018). Evaluating transportation land use impacts: Considering the impacts, benefits and costs of different land use development patterns. Victoria Transport Policy Institute.
- Megarani, D. (2013). Dampak pertumbuhan penduduk terhadap alih fungsi lahan di Kabupaten Sukoharjo tahun 2000–2013. *Jurnal Geografi*, 11(2), 101–115.
- Nugraheni, I., Yudana, G., & Rini, E. (2022). Kesesuaian aksesibilitas kawasan wisata budaya Kota Surakarta ditinjau dari jalur pedestrian sebagai NMT. *Jurnal Pembangunan Wilayah dan Perencanaan Partisipatif*, 17(2), 77–89.
- Nugroho, A. (2017). Perubahan penggunaan lahan dan dampaknya terhadap kualitas lingkungan di kawasan peri-urban. *Jurnal Geografi*, 9(1), 12–25.
- Nugroho, A., Adi, A., & Sigit, A. A. (2022). Analisis spasial perubahan penggunaan lahan terhadap rencana detail tata ruang (RDTR) di Kecamatan Klaten Utara menggunakan sistem informasi geografis (SIG) tahun 2012–2020. *Jurnal Geomatika*, 8(2), 1–17.
- Nuriyanto. (2020). Urgensi reforma agraria: Menuju penataan penggunaan tanah yang berkeadilan sosial. *Jurnal Rontal Keilmuan PKN*, 6(1), 55–64.
- Oktalina, S. N., Awang, S. A., & Hartono, S. (2016). The farmer livelihood asset mapping on community forest management in Gunungkidul District. *Jurnal Manusia dan Lingkungan*, 23(1), 58–65.
- Panjaya, A., & Mubaraq, A. (2023). Analisis pertumbuhan dan kepadatan penduduk terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Kalimantan Barat. *Prosiding Seminar Nasional Program Studi Ekonomi Islam*, 1, 55–66.
- Prasetyo, A. (2019). Pengaruh kepadatan penduduk terhadap perubahan penggunaan lahan di Kota Semarang. *Jurnal Pembangunan Wilayah dan Kota*, 15(2), 101–112.
- Prihatin, R. B. (2016). Alih fungsi lahan di perkotaan (Studi kasus di Kota Bandung dan Yogyakarta). *Jurnal Aspirasi*, 6(2), 105–118.
- Putri, D., Astuti, A., & Ratri, W. S. (2023). Pengaruh alih fungsi lahan pertanian terhadap kesejahteraan petani di Kabupaten Sleman. *Jurnal Ilmiah Agritas*, 15(1), 45–56.
- Rifai, L. F., Amarrohman, F. J., & Yusuf, M. A. (2023). Analisis pengaruh perubahan penggunaan lahan akibat pembangunan fasilitas umum dan fasilitas sosial terhadap zona nilai tanah di Kecamatan Banyudono Kabupaten Boyolali. *Elipsoida: Jurnal Geodesi dan Geomatika*, 6(2), 70–77.

- Rizkitasari, E. R., Sudarsono, B., & Sasmito, B. (2014). Analisis pengaruh kepadatan penduduk terhadap kepadatan ruas jalan di Tembalang, Semarang. *Jurnal Geodesi Undip*, 3(4), 210–219.
- Rizqi, W. (2020). Implementasi kebijakan alih fungsi lahan pertanian ke non-pertanian di Sleman berdasarkan perspektif institusionalis. *Government: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 13(1), 43–56.
- Saputro, T., & Kusuma, A. (2023). Kajian analisis aksesibilitas transportasi publik di kawasan Cipete Raya. *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, 23(3), 211–225.
- Savitri, D., & Supriatna, A. (2021). Analisis perubahan penggunaan tanah di Indonesia: 2009–2019. *Jurnal Pertanahan*, 11(1), 77–92.
- Shodiq, D. E. (2023). Analisis proporsi populasi penduduk terhadap rumah tangga dengan hunian layak dan terjangkau. *Jurnal Sains Edukatika Indonesia (JSEI)*, 4(1), 23–28. 66
- Suprayogi, R., & Rochani, A. (2021). Kesesuaian perubahan penggunaan lahan dengan rencana tata ruang di kawasan peri-urban. *Jurnal Kajian Ruang*, 1(2), 238–254.
- Suprayogi, R., & Rochani, A. (2022). Kesesuaian perubahan penggunaan lahan dengan rencana tata ruang di kawasan peri-urban. *Jurnal Kajian Ruang*, 2(1), 45–59.
- Susanto, H. (2021). Konversi lahan pertanian dan implikasinya terhadap transportasi di DIY. *Jurnal Transportasi dan Logistik*, 5(2), 88–99.
- Todaro, M. P., & Smith, S. C. (2011). *Economic development* (11th ed.). Boston: Addison-Wesley.
- Wahyudi, E. K. O. B. (2009). Analisis perubahan penggunaan lahan di Kecamatan Sokaraja Kabupaten Banyumas tahun 1994 dan 2004. *Jurnal Geografi*, 7(2), 19–30.
- Wibisono, D. (2020). Peningkatan aksesibilitas jalan dan dampaknya terhadap lalu lintas di wilayah peri-urban Yogyakarta. *Jurnal Transportasi*, 20(3), 211–222.